

DIPLOMASI PERDAMAIAN INDONESIA DALAM BOARD OF PEACE: POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF, IDENTITAS KEAGAMAAN, DAN DILEMA KETERLIBATAN DALAM ARSITEKTUR PERDAMAIAN GAZA (2025-2026)

Andi Siti Raisya Batari Mughni¹, Irsyad Dhahri Somad²
Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Negeri Makassar

e-mail: Raisyabatarii22@gmail.com irsyad.dhahri@unm.ac.id

ABSTRAK

Pada bulan Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat pernyataan Board of Peace (BoP), yang merupakan sebuah inisiatif internasional dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi proses peralihan, pemulihan, dan pembangunan kembali di Gaza. Indonesia kemudian menyatakan siap mengirimkan hingga 8.000 prajurit TNI ke International Stabilization Force (ISF) dan bersedia menjabat sebagai Wakil Komandan ISF. Ada perdebatan yang timbul dari keputusan itu. Ini dianggap sebagai contoh kebijakan internasional yang bebas, aktif, dan proaktif. Karena BoP berasal dari kekuatan dominan, kelompok lain mempertanyakan konsistensi keputusan tersebut. Artikel ini membahas bagaimana Indonesia menggunakan BoP sebagai alat untuk diplomasi perdamaian, bagaimana dukungan keagamaan dan identitas keagamaan memengaruhi keputusan tersebut, dan bagaimana pemerintah menghadapi tekanan dalam negeri dan peluang internasional. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Informasi dikumpulkan dari pernyataan resmi, berita utama, dan penelitian akademik. Kerangka bebas aktif, konsep daya menengah dan kekuatan lembut, dan konsep dua tingkat digunakan untuk melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Indonesia menganggap BoP sebagai satu-satunya forum pembicaraan yang tersedia dan bukan sebagai pilihan terbaik; (2) pemerintah berusaha mengurangi risiko dengan menggunakan caveat nasional dan klausa keluar; (3) legitimasi di tingkat dalam negeri diperoleh melalui konsultasi dengan negara-negara Muslim, diplomat berpengalaman, dan para ulama; dan (4) partisipasi ditunda setelah Maret 2026 karena konflik yang semakin meningkat antara I. Menurut artikel ini, diplomasi Indonesia lebih tepat diartikan sebagai politik bebas aktif. Namun, keberhasilan dari pendekatan ini baru bisa dinilai setelah ISF benar-benar berjalan dengan baik.

Kata kunci: diplomasi perdamaian; Board of Peace; bebas aktif; Gaza; Indonesia; *middle power*

ABSTRACT

In January 2026, President Prabowo Subianto signed the charter of the Board of Peace (BoP), an international body initiated by U.S. President Donald Trump to oversee the transition, stabilization, and reconstruction of Gaza. Indonesia subsequently declared its readiness to deploy up to 8,000 troops to the International Stabilization Force (ISF) and accepted the post of ISF Deputy Commander. This article analyzes how Indonesia uses the BoP as an instrument of peace diplomacy,

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

how religious identity and solidarity with Palestine frame the decision, and how the government manages the tension between domestic pressure and international opportunity. Using a qualitative single-case study drawing on official statements, mainstream media, and academic literature, and applying the free-and-active doctrine, middle power and soft power concepts, and two-level game theory, the article finds that Indonesia presents the BoP as the only available negotiation forum rather than an ideal one; limits risk through national caveats and an exit clause; builds domestic legitimacy through consultation with Muslim-majority states, senior diplomats, and clerics; and treats its commitment as conditional, as shown by the suspension of its involvement since March 2026; as of early October 2026, no Indonesian deployment to Gaza had been reported. The article concludes that Indonesia's conduct is best read as conditional pragmatism rather than a departure from the free-and-active principle.

Keywords: *peace diplomacy; Board of Peace; free-and-active foreign policy; Gaza; Indonesia; middle power*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik luar negeri Indonesia sejak awal berdiri berpijak pada prinsip bebas aktif. Mohammad Hatta meng gambarkannya sebagai sikap tidak memihak blok mana pun, tetapi tetap aktif mengupayakan perdamaian dunia.¹ Mandat itu ditemukan dalam dokumen dasar negara, Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah pilar ketertiban global. Indonesia telah berpartisipasi dalam diplomasi perdamaian selama mandat itu, termasuk Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia-Afrika 1955, serta mengirim Kontingen Garuda untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Isu Palestina menempati posisi yang sangat khusus dalam tradisi itu. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi konsensus lintas pemerintahan sekaligus lintas kelompok masyarakat, sehingga setiap kebijakan Indonesia yang menyentuh Gaza akan langsung dibaca melalui kaca mata solidaritas, keagamaan, dan konstitusional. Karena itu, kebijakan luar negeri terhadap Gaza hampir selalu memiliki dimensi domestik yang kuat.

Sejak serangan militer Israel ke Gaza pada Oktober 2023, konteks internasional berubah secara signifikan. Pada September 2025, Presiden Trump akhirnya mengajukan rencana perdamaian terkait 20 poin, yang mencakup gagasan tentang pemerintahan transisi yang didukung oleh pasukan multinasional dan pengawasan internasional. Tahap pertama gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, dan pada 17 November 2025 Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang memberi otorisasi pembentukan pasukan stabilisasi internasional sementara di Gaza di bawah arahan *Board of Peace*.²

Indonesia mengambil tindakan yang menarik perhatian di dalam dan di luar negeri dalam konteks ini. Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo menandatangani Piagam Board of Peace di Davos, yang menandai dimulainya operasi badan tersebut.³ Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan sekitar 8.000 personel untuk misi stabilisasi pada pertemuan pertamanya

¹ Mohammad Hatta, "Indonesia's Foreign Policy," *Foreign Affairs* 31, no. 3 (1953): 441-452.

² "Indonesia jadi wakil komandan pasukan stabilisasi Gaza," *Tempo*, 19 Februari 2026, <https://www.tempo.co/politik/indonesia-jadi-wakil-komandan-pasukan-stabilisasi-gaza-2116397>.

³ "Serba-serbi Prabowo di WEF 2026 Davos: Gabung Dewan Perdamaian Gaza & pidato Prabowoomics," *Bisnis.com*, 23 Januari 2026, <https://kabar24.bisnis.com/read/20260123/15/1946592/serba-serbi-prabowo-di-wef-2026-davos-gabung-dewan-perdamaian-gaza-pidato-prabowonomics>.

pada 19 Februari 2026 di Washington, DC⁴ Angka ini sangat berbeda dari tawaran umum Presiden di Sidang Umum PBB pada September 2025 yang menyebutkan hingga 20.000 personel untuk berbagai misi perdamaian.⁵ Dalam sejarah diplomasi Indonesia terhadap konflik Timur Tengah, peran ini jarang terjadi; sebelumnya, Indonesia berperan sebagai pendukung diplomatik, tetapi sekarang ingin membantu pasukan di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan penting bagi studi diplomasi. BoP bukan organisasi internasional konvensional; ia lahir dari inisiatif seorang kepala negara dan menempatkan Amerika Serikat pada posisi sentral. Di sisi lain, ia mendapat payung legal dari Resolusi DK PBB 2803 dan menjadi mekanisme yang saat ini mengelola transisi Gaza. Bagaimana negara seperti Indonesia, yang menjunjung bebas aktif dan membawa beban solidaritas terhadap Palestina, menavigasi forum semacam ini? Artikel ini menjawab tiga pertanyaan:

1. Dengan cara apa Indonesia membingkai dan membenarkan keterlibatannya dalam BoP, dan bagaimana elemen identitas keagamaan dan solidaritas terhadap Palestina mempengaruhinya?
2. Bagaimana Indonesia mengendalikan risiko yang terkait dengan keterlibatan tersebut dari segi politik, militer, dan keuangan?
3. Bagaimana keterlibatan ini dapat dievaluasi melalui prinsip bebas aktif dan konsep *middle power*?

1.3 Tujuan dan Kontribusi

Tujuan artikel ini adalah memberikan analisis akademik atas salah satu episode diplomasi Indonesia yang paling baru. Kontribusinya ada pada tiga hal. Pertama, artikel ini menawarkan pembacaan teoretis atas kasus yang masih berkembang dan baru sedikit dikaji dalam literatur ilmiah. Kedua, ia menunjukkan bagaimana diplomasi perdamaian Indonesia bekerja melalui kombinasi aktor negara dan non-negara. Ketiga, ia mengidentifikasi mekanisme pembatasan risiko, seperti *national caveats* dan klausul keluar, yang dapat menjadi pelajaran bagi studi kebijakan luar negeri negara berkekuatan menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian berikutnya akan membahas tinjauan literatur, kerangka analisis, dan metode yang digunakan. Selanjutnya akan ada bagian pembahasan yang membahas latar belakang BoP, alasan dan proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia, aspek keagamaan, komitmen militer dan batasannya, dinamika dalam negeri, kemajuan di lapangan, dan evaluasi teoretis. Kesimpulan dan saran disertakan di akhir artikel.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Konsep bebas aktif pertama kali diungkapkan oleh Hatta dalam pidatonya berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" tahun 1948, dan kemudian memberikan penjelasan kepada pembaca di luar negeri melalui artikel yang dia ungkapkan di majalah *Foreign Affairs*. Pada dasarnya, Indonesia tidak ingin menjadi sasaran persaingan antara dua kelompok. Sebaliknya, ia ingin mengambil keputusan mengenai masalah internasional berdasarkan kepentingan negara dan nilai-nilai yang dipegangnya. Menurut Sukma, arti bebas aktif bukan sesuatu yang abadi. Setiap pemerintahan mengulangi pemahaman ini sesuai dengan tantangan yang dihadapinya,

⁴ "Ini pidato lengkap Prabowo di Board of Peace: Komitmen perdamaian dan 8.000 pasukan untuk Gaza," *Bisnis.com*, 20 Februari 2026, <https://kabar24.bisnis.com/read/20260220/15/1954344/ini-pidato-lengkap-prabowo-di-board-of-peace-komitmen-perdamaian-dan-8000-pasukan-untuk-gaza>.

⁵ "Indonesia Readies Up to 8,000 Troops for Board of Peace Efforts in Gaza," *ABC News*, 11 Februari 2026, <https://www.abc.net.au/news/2026-02-11/indonesia-to-send-8000-troops-to-gaza-idf-peacekeeping/106330718>.

misalnya, pemerintahan Sukarno cenderung lebih revolusioner, pemerintahan Soeharto berkonsentrasi pada pembangunan dan stabilitas regional, dan pemerintahan reformasi lebih terbuka terhadap diplomasi multilateral dan masalah demokrasi.⁶

Menurut artikel ini, netralitas pasif berbeda dengan bebas aktif. Sementara "bebas" menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, "aktif" menunjukkan bahwa seseorang harus benar-benar memberikan kontribusi. Pertanyaan analitisnya bukan tentang apakah Indonesia berinteraksi dengan Amerika Serikat, tetapi apakah interaksi tersebut menjaga otonomi dan memberi manfaat sesuai dengan tujuan yang diklaim.

2.2 Middle Power dan Soft Power

Negara-negara kecil masih dapat memengaruhi orang lain melalui diplomasi, kerja sama, pembentukan aturan, dan peran mediator atau penghubung, meskipun kemampuan material mereka tidak sebanding dengan negara besar. Menurut banyak buku kebijakan luar negeri, Indonesia dapat menjadi kekuatan menengah karena populasi yang besar, lokasi strategis, dan peran sebagai pemimpin ASEAN.

Konsep *soft power* dari Nye menjelaskan kemampuan memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik dan legitimasi, bukan paksaan atau imbalan.⁷ Sumbernya adalah budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dipandang sah dan bermoral. Bagi Indonesia, identitas sebagai negara Muslim terbesar yang demokratis dan moderat sering dipandang sebagai modal *soft power* utama. Dalam kasus BoP, modal itu menjadi relevan karena kehadiran negara Muslim dapat memberi legitimasi pada inisiatif yang dalam konteks lain mungkin dicurigai di dunia Islam.

2.3 Diplomasi dan Agama

Johnston dan Sampson berpendapat bahwa agama sering diabaikan dalam pembentukan identitas negara, padahal tokoh-tokoh agama bisa menjadi pembangun kepercayaan, pihak yang memediasi, serta sumber legitimasi moral dalam menyelesaikan perbedaan.⁸ Diplomasi yang melibatkan agama tidak berarti selalu melibatkan para ulama; ini juga mencakup bagaimana negara menggunakan simbol, identitas, dan jaringan keagamaan untuk memperkuat kebijakan tertentu, serta cara negara mengurus keinginan keagamaan rakyatnya. Kedua pengertian itu relevan di sini.

2.4 Permainan Dua Tingkat

Putnam menyarankan agar para negosiator internasional bekerja di dua meja sekaligus. Ia mencari kesepakatan dengan pihak lain di meja internasional, dan di meja domestik, ia harus memastikan bahwa kesepakatan tersebut disetujui oleh orang-orang yang mendukungnya. Kesepakatan yang layak secara internasional namun tidak bisa diterima di dalam negeri akan tidak berhasil.⁹ Model ini membantu menjelaskan alasan pemerintah Indonesia sangat hati-hati dalam menyampaikan informasi tentang anggota BoP, menekankan bagian mengenai kemungkinan keluar, serta berdiskusi dengan tokoh dan organisasi keagamaan.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Celah Penelitian

Kajian tentang diplomasi Indonesia terhadap isu Palestina cukup banyak, tetapi hampir seluruhnya terbit sebelum BoP terbentuk. Mudore memakai teori resolusi konflik untuk

⁶ Rizal Sukma, "The Evolution of Indonesia's Foreign Policy: An Indonesian View," *Asian Survey* 35, no. 3 (1995): 304–315.

⁷ Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: PublicAffairs, 2004).

⁸ Douglas Johnston dan Cynthia Sampson, ed., *Religion, the Missing Dimension of Statecraft* (New York: Oxford University Press, 1994).

⁹ Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," *International Organization* 42, no. 3 (1988): 427–460.

menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif melalui keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dan menolak kebijakan Amerika Serikat terkait Yerusalem, dan ia menggambarkan peran Indonesia dengan berbagai label seperti *co-sponsor*, fasilitator, mediator, inisiator, motivator, dan *justifier*.¹⁰ Satris, Seperti yang disebutkan oleh Nugraha dan Maura, Satris mengatakan bahwa Indonesia berkolaborasi melalui Organisasi Kerja Sama Islam setelah Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel. Dia juga menekankan bahwa penting untuk menghormati status hukum Yerusalem sesuai dengan hukum internasional.¹¹ Suratiningsih, Puspita, dan Safira menganalisis cara pemerintah Indonesia melakukan diplomasi bersama organisasi NGO kemanusiaan terkait isu Palestina antara tahun 2014 hingga 2020, sehingga menganggap lembaga non-negara sebagai bagian dari upaya diplomasi tersebut.¹²

Kajian yang lebih baru memperluas sudut pandang. Untuk menganalisis tujuan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2014-2023, Nugraha dan Maura menggunakan pendekatan keamanan manusia. Mereka menyimpulkan bahwa tujuan itu adalah untuk meningkatkan keamanan manusia warga Palestina melalui beasiswa, pembangunan rumah sakit, dan diplomasi di OKI dan PBB. Mereka juga mengkritik bahwa negara lebih memprioritaskan keamanan negara daripada keamanan manusia¹³ Untuk membandingkan kebijakan bantuan kemanusiaan di Indonesia dan Kuwait dengan kerangka kebijakan luar negeri Holsti, Alia dan kolega melakukan penelitian literatur. Mereka juga menggunakan kerangka ini sebagai pedoman untuk kebijakan Indonesia, dengan contoh pernyataan lisan di Mahkamah Internasional pada Februari 2024.¹⁴

Dari kelima kajian tersebut tampak dua pola. Pertama, diplomasi Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina dan bergantung pada forum multilateral, bantuan kemanusiaan, dan solidaritas daripada bertindak di lapangan. Kedua, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan lembaga yang diinisiasi Amerika Serikat dan mengirimkan pasukan ke Gaza belum dibahas dalam penelitian tersebut. Artikel ini mengaitkan pendekatan domestik, pembatasan risiko, dan evaluasi yang tidak terikat dengan BoP yang baru dibentuk pada tahun 2026.

Artikel ini menggabungkan keempat lensa tersebut. Bebas aktif berfungsi sebagai ukuran normatif, *middle power* dan *soft power* sebagai penjelasan atas sumber pengaruh, pendekatan keagamaan sebagai penjelasan atas pembingkai identitas, dan permainan dua tingkat sebagai penjelasan atas pengelolaan tekanan domestik. Konsekuensinya, sebagian besar data empiris artikel ini bersumber dari pemberitaan dan pernyataan resmi, yang menuntut kehati-hatian metodologis seperti dijelaskan pada bagian berikut.

3. METODOLOGI

3.1 Desain Penelitian

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan dirancang sebagai studi kasus tunggal. Studi kasus ini dipilih karena fenomena yang diteliti—keputusan dan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam BoP—berlangsung dalam konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan konteksnya tidak tegas, dan pertanyaan penelitian berbentuk "bagaimana". Unit

¹⁰ S. B. Mudore, "Peran diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina," *Jurnal CMES* 12, no. 2 (2019): 170–181, <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>.

¹¹ R. Satris, "Peranan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel," *POLITEA* 2, no. 2 (2019): 161–170, <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884>, sebagaimana dirujuk dalam T. A. Nugraha dan A. Maura, "Analisis politik luar negeri Indonesia: Promosi 'keamanan manusia' di Palestina," *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8, no. 2 (2023): 83–109.

¹² D. Suratiningsih, D. Puspita, dan Safira, "Diplomasi pemerintah Indonesia dan NGO kemanusiaan Indonesia dalam isu Palestina pada tahun 2014–2020," *Proyeksi* 25, no. 1 (2020): 11–28, <https://doi.org/10.26418/proyeksi.V25i1.2602>.

¹³ Nugraha dan Maura, "Analisis politik luar negeri."

¹⁴ N. Alia dkk., "Studi komparatif: Implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dan Kuwait terkait pemberian humanitarian aid terhadap polemik Palestina–Israel," *Jurnal Kajian Pemerintah* 10, no. 2 (2024): 25–38. Kerangka K. J. Holsti (1992) yang disebut dalam teks dirujuk dari artikel ini.

analisisnya adalah kebijakan dan praktik diplomatik pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan BoP dan ISF dari Oktober 2025 hingga awal Oktober 2026.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dari tiga kelompok sumber:

1. Pernyataan dan dokumen resmi: keterangan pemerintah yang dikutip media, pidato Presiden, dan keterangan Kementerian Luar Negeri.
2. Pemberitaan media arus utama nasional: Antara, Bisnis.com, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Tempo, Detik, IDN Times, Liputan6, Reuters, Al Jazeera, dan ABC News. Penelusuran data ditutup pada 3 Oktober 2026.
3. Literatur akademik tentang bebas aktif, *soft power*, diplomasi keagamaan, dan permainan dua tingkat.

Pengumpulan dilakukan melalui penelusuran daring dengan kata kunci “Board of Peace”, “ISF Indonesia”, “diplomasi Prabowo Gaza”, dan padanannya dalam bahasa Inggris.

3.3 Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Analisis dilakukan melalui tiga langkah: (1) menyusun kronologi peristiwa; (2) mengodekan pernyataan aktor berdasarkan tema, yaitu motif, pembatasan risiko, legitimasi domestik, dan kondisi keluar; serta (3) menafsirkan temuan dengan kerangka analitis pada Bab 2. Untuk menjaga keabsahan, penulis menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari beberapa media dan membedakan fakta yang terverifikasi dari klaim politik.

Triangulasi ini perlu karena terdapat ketidakkonsistenan antarsumber. Angka 8.000 personel disebut dalam pidato Presiden pada pertemuan perdana BoP, sementara sebagian laporan menyebut hingga 20.000 personel. Menurut penelusuran, jumlah 20.000 berasal dari tawaran Presiden pada Sidang Umum PBB pada September 2025,¹⁵ sementara target total ISF yang ditetapkan pada Februari 2026 adalah sekitar 20.000 karyawan dari negara kontributor.¹⁶ Perbedaan ini terlihat dalam diskusi, dan artikel ini menggunakan angka 8.000 sebagai tingkat kesiapan Indonesia dalam forum BoP.

3.4 Keterbatasan

Pertama, kasus ini masih dalam proses penyelidikan, jadi kesimpulan yang ada belum tetap. Kedua, beberapa berita berasal dari pernyataan pejabat yang memiliki kepentingan politik, sehingga klaim keberhasilan terdengar seperti klaim, bukan fakta yang sudah diverifikasi. Ketiga, tidak ada wawancara langsung dalam penelitian ini. Penelitian lebih lanjut mungkin melihat pejabat Kemlu, TNI, atau perwakilan ormas keagamaan.

4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1 Arsitektur BoP dan Posisi Indonesia

BoP perlu dipahami sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang dimulai dari rencana 20 poin, gencatan senjata tahap pertama Oktober 2025, dan Resolusi 2803 pada November 2025. Sementara ISF merupakan bagian keamanannya, BoP dirancang sebagai badan transisi yang bertanggung jawab atas administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza. Menurut Penjelasan Komandan ISF, Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers, pasukan ini akan membantu melatih polisi, mengamankan perbatasan, melindungi warga sipil dan operasi kemanusiaan, serta ditempatkan di lima sektor, yaitu Rafah, Khan Younis, Deir al-Balah, Kota Gaza, dan Gaza Utara.¹⁷

¹⁵ “Indonesia Readies Up to 8,000 Troops,” *ABC News*.

¹⁶ “Apa itu pasukan ISF yang diumumkan Board of Peace, RI wakil komandan!” *IDN Times*, 2026, <https://www.idntimes.com/news/world/apa-itu-pasukan-isf-yang-diumumkan-board-of-peace-c1c2-01-vtsv1-b8q5qw>.

¹⁷ “Apa itu pasukan ISF yang diumumkan Board of Peace?” *CNN Indonesia*, 20 Februari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260220090319-134-1329890/apa-itu-pasukan-isf-yang-diumumkan-board-of-peace>.

Beberapa hal menandai kekhasan arsitektur ini. Pertama, ia berada pada persimpangan antara legalitas multilateral (otorisasi DK PBB) dan inisiatif unilateral (gagasan Washington). Kedua, pendanaannya bergantung pada partisipasi sukarela. Dalam pertemuan perdana, Trump mengumumkan komitmen 10 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza dan menyatakan bahwa sejumlah negara menjanjikan tambahan 7 miliar dolar AS, dengan target ISF sekitar 20.000 personel.¹⁸ Ketiga, struktur kepemimpinannya memberi peran sentral kepada Amerika Serikat. Ketiga ciri ini menjelaskan mengapa keikutsertaan di dalamnya adalah keputusan yang sensitif.

Posisi Indonesia dalam arsitektur ini cukup menonjol. Presiden Prabowo hadir langsung pada pertemuan perdana di Washington, D.C. dan menegaskan komitmen terhadap rekonstruksi dan stabilisasi Gaza serta dukungan pada solusi dua negara.¹⁹ Lebih jauh, Indonesia menerima tawaran posisi Wakil Komandan ISF dari Mayjen Jeffers.²⁰ Posisi ini memberi Indonesia akses pada perencanaan operasional, sesuatu yang tidak akan diperoleh hanya dengan menjadi anggota biasa. Dalam kerangka *middle power*, posisi semacam ini adalah bentuk pengaruh struktural, yaitu kemampuan ikut menentukan aturan main dari dalam.

Tabel 1 merangkum kronologi utama yang menjadi dasar analisis.

Tabel 1. Kronologi Utama Keterlibatan Indonesia dalam BoP dan ISF

Tanggal	Peristiwa	Sumber
17 Nov 2025	Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang mengotorisasi ISF sementara di Gaza	Tempo (2026)
22 Jan 2026	Presiden Prabowo menandatangani Piagam BoP di Davos	Bisnis.com (2026d)
31 Jan 2026	Serangan udara Israel di Gaza; Indonesia menyatakan keprihatinan dan menempuh jalur BoP	Antara (2026a)
4 Feb 2026	Presiden menerima mantan Menlu dan Wamenlu membahas BoP	Bisnis.com (2026b)
19 Feb 2026	Pertemuan perdana BoP; Indonesia siap kirim hingga 8.000 personel dan menerima posisi Wakil Komandan ISF	Bisnis.com (2026a); Tempo (2026)
28 Feb 2026	Perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran meningkat	RRI (2026)
3-6 Mar 2026	Menlu Sugiono menyatakan pembahasan BoP ditangguhkan; Kemlu mengumumkan resmi pada 6 Maret	Reuters (2026a); InfoPublik (2026b)
17-20 Mar 2026	Pengiriman pasukan ditunda; Mensesneg: semua di-hold; personel TNI tetap siaga	Middle East Monitor (2026); Detik (2026); Republika (2026)
21 Apr 2026	Menkeu: tidak ada komitmen pembayaran; Presiden tidak pernah menjanjikan US\$1 miliar	Tempo English (2026)

¹⁸ "Apa itu pasukan ISF," *IDN Times*.

¹⁹ "Prabowo hadir KTT perdana Board of Peace, tegaskan komitmen untuk Gaza," *Bisnis.com*, 19 Februari 2026, <https://kabar24.bisnis.com/read/20260219/15/1954212/prabowo-hadiri-ktt-perdana-board-of-peace-tegaskan-komitmen-untuk-gaza>.

²⁰ "Indonesia jadi wakil komandan," *Tempo*.

Tanggal	Peristiwa	Sumber
1 Jul 2026	BoP mengumumkan kendaraan taktis pertama tiba di pangkalan ISF	Liputan6 (2026)
1 Okt 2026	Menlu baru Arrmanatha Nasir: Indonesia masih memantau perkembangan BoP dan ISF	Reuters (2026b)

Keterangan: nama sumber pada kolom ketiga merujuk pada Daftar Pustaka.

4.2 Bingkai Pemerintah: Mengapa Bergabung

Pemerintah Indonesia memberikan empat alasan untuk pendekatan diplomasi.

Pertama, rangka kerja "forum satu-satunya". Presiden menyatakan dalam pertemuan dengan para ulama bahwa *Board of Peace* (BoP) adalah satu-satunya forum saat ini yang dapat digunakan untuk membahas perdamaian antara Palestina dan Gaza.²¹ Bingkai ini bersifat realistis, yaitu tidak menyatakan BoP yang sempurna, melainkan menekankan bahwa berada di dalam lebih baik daripada berada di luar ketika keputusan tentang nasib rakyat Gaza sedang dibuat. Logikanya mirip dengan argumen bahwa pengaruh hanya bisa didapat dari posisi duduk di meja negosiasi.

Kedua, bingkai akses kemanusiaan. Wakil pemerintah menyebutkan bahwa partisipasi dalam BoP dan diplomasi global lainnya bertujuan untuk memperluas jalur pengiriman bantuan yang sebelumnya sering mengalami hambatan sebelum sampai ke penduduk Gaza.²² Bingkai ini menghubungkan keputusan strategis dengan kebutuhan manusia yang nyata, sehingga lebih mudah disambut oleh masyarakat.

Ketiga, buat kerangka posisi tawar dan solusi dari kedua negara. Pemerintah mengatakan bahwa ikut serta bertujuan memperkuat kemampuan berunding Indonesia dalam menjaga perdamaian, terutama untuk mencapai solusi dua negara dan memastikan kestabilan di Gaza.²³ Presiden juga mengatakan bahwa kebijakan luar negeri harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.²⁴ Klaim terakhir ini penting karena menunjukkan bahwa upaya perdamaian terkait dengan masalah negara secara keseluruhan, seperti hubungan dengan Amerika Serikat.

Selain itu, ketua MPR mengaitkan kunjungan ke Washington dengan rencana investasi besar AS.²⁵

Jadi, keputusan BoP jelas terkait dengan perhitungan ekonomi dan politik antara dua negara.

Keempat, bingkai kontinuitas sejarah. Beberapa pendukung kebijakan mengaitkan tindakan ini dengan pesan konstitusi dan rekam jejak Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, termasuk komitmennya untuk membantu pembangunan infrastruktur

²¹ "Di depan ulama, Prabowo tegaskan RI keluar dari BoP jika tak perjuangkan Palestina," *Investortrust*, 2026, <https://investortrust.id/international/96406/di-depan-ulama-prabowo-tegaskan-ri-keluar-dari-bop-jika-tak-perjuangkan-palestina>.

²² "Buka akses bantuan ke Gaza jadi salah satu alasan Presiden Prabowo gabung Board of Peace," *IDXChannel*, 2026, <https://www.idxchannel.com/news/buka-akses-bantuan-ke-gaza-jadi-salah-satu-alasan-presiden-prabowo-gabung-board-of-peace>.

²³ "RI prihatin serangan Israel di Gaza, tempuh jalur Dewan Perdamaian," *Antara*, 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5390018/ri-prihatin-serangan-israel-di-gaza-tempuh-jalur-dewan-perdamaian>.

²⁴ "Isi pertemuan Prabowo dengan eks Menlu-Wamenlu di Istana, bahas Board of Peace," *Bisnis.com*, 5 Februari 2026, <https://kabar24.bisnis.com/read/20260205/15/1950335/isi-pertemuan-prabowo-dengan-eks-menlu-wamenlu-di-istana-bahas-board-of-peace>.

²⁵ "Ketua MPR RI sebut Indonesia ikut BoP untuk bebaskan Palestina dari cengkeraman Israel," *Antara*, 2026, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/502522/ketua-mpr-ri-sebut-indonesia-ikut-bop-untuk-bebaskan-palestina-dari-cengkeraman-israel>.

kesehatan di Palestina pada Oktober 2022.²⁶ Bingkai ini berusaha menjelaskan bahwa BoP adalah kelanjutan dari sesuatu dan bukanlah perubahan arah.

Dari keempat bingkai tersebut terlihat strategi komunikasi yang disengaja, yaitu menempatkan BoP dalam bahasa yang ramah bagi masyarakat Indonesia, seperti perdamaian, kemanusiaan, dan Palestina, bukan dalam bahasa yang berkaitan dengan kepentingan strategis. Ini sesuai dengan argumen Putnam bahwa cara pandang dalam negeri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi di tingkat internasional.²⁷

4.3 Dimensi Keagamaan dan Identitas

Meskipun BoP bukan forum keagamaan, identitas keagamaan hadir di dalamnya dalam tiga bentuk.

Pertama, lakukan perundingan dengan negara-negara Muslim. Seperti yang dijelaskan oleh Hasan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri, bahwa keputusan bergabung telah dibuat melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara Islam atau negara dengan mayoritas Muslim, dan bahwa delapan negara tersebut dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di BoP. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bertindak sendirian, tetapi mengonsolidasikan posisi bersama negara-negara yang memiliki identitas dan kepentingan yang sama.²⁸ Sebagai cara untuk mengurangi risiko bahwa Indonesia dipandang sebagai pengikut Washington di mata dunia Islam, ini adalah jenis diplomasi koalisi konvensional antara kekuatan tengah.

Kedua, legitimasi dilakukan melalui tokoh dan organisasi keagamaan, yang berfungsi sebagai sumber dukungan dan tekanan. Pada 1 Maret 2026, MUI mengatakan bahwa Indonesia harus berhenti menggunakan BoP karena serangan AS ke Iran membuat program itu tidak berfungsi, sementara NU menyarankan agar Indonesia memanfaatkan posisinya untuk menekan Israel dan meminta AS menghentikan kekerasan.²⁹ Setelah menghadiri pertemuan dengan para ulama dan perwakilan organisasi masyarakat Islam, presiden menyatakan bahwa jika hasil BoP tidak menguntungkan Palestina, Indonesia akan menarik diri.³⁰ Dalam pertemuan yang sama, ia menyatakan bahwa Indonesia tetap dalam BoP, tetapi siap untuk keluar jika tidak ada kemajuan yang signifikan. Sementara itu, beberapa pengurus MUI meminta masyarakat untuk memberi waktu agar diplomasi dapat berhasil.³¹ Interaksi ini adalah contoh umum dari praktik track-two, di mana negara menggunakan kekuatan moral organisasi keagamaan untuk mengurangi ketidaksetujuan masyarakat terhadap sesuatu. Aktor keagamaan berperan dalam kerangka teori Johnston dan Sampson.³² Sumber legitimasi untuk kebijakan pemerintah, tetapi karena ada beberapa yang menolak untuk berpartisipasi, legitimasi tersebut terbatas dan harus dipertahankan.

Ketiga, representasi religius dalam pembicaraan publik Misalnya, ketua MPR menyatakan bahwa partisipasi Indonesia diharapkan akan memungkinkan warga Gaza merayakan Ramadan dengan damai bersama keluarga mereka.³³ Wacana semacam ini menunjukkan bahwa elemen

²⁶ "Indonesia pimpin langkah strategis perdamaian Palestina melalui Board of Peace," *Metro TV*, 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/KRXC5dg3-indonesia-pimpin-langkah-strategis-perdamaian-palestina-melalui-board-of-peace>.

²⁷ Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics."

²⁸ "Prabowo: RI bisa keluar Dewan Perdamaian, uang iuran untuk bantu rakyat Palestina," *Bisnis.com*, 5 Februari 2026, <https://kabar24.bisnis.com/read/20260205/15/1950299/prabowo-ri-bisa-keluar-dewan-perdamaian-uang-iuran-untuk-bantu-rakyat-palestina>.

²⁹ "Discussions with Board of Peace 'on Hold' due to Iran War, Indonesia Says," *Reuters*, 4 Maret 2026, dimuat di *Yahoo News*, <https://www.yahoo.com/news/articles/discussions-board-peace-hold-due-095655588.html>.

³⁰ "Prabowo Faces Muslim Group Backlash, Says Indonesia Will Quit Trump's Board of Peace If It Fails to Benefit Palestinians," *Malay Mail*, 7 Maret 2026, <https://www.malaymail.com/news/world/2026/03/07/prabowo-faces-muslim-group-backlash-says-indonesia-will-quit-trumps-board-of-peace-if-it-fails-to-benefit-palestinians/211672>.

³¹ "Di depan ulama, Prabowo tegaskan RI keluar," *Investortrust*.

³² Johnston dan Sampson, *Religion, the Missing Dimension*.

³³ "Ketua MPR RI sebut Indonesia ikut BoP," *Antara*.

keagamaan mempengaruhi perasaan dan rasa persatuan, yang membuat kebijakan lebih mudah diterima oleh orang-orang.

Perlu diketahui, dimensi keagamaan ini hanya berperan sebagai penjelasan, bukan sebagai penentu. Keputusan Indonesia masih didasari oleh pertimbangan geopolitik dan ekonomi. Namun tanpa dukungan agama dan pembicaraan dengan kalangan Islam, biaya politik di dalam negeri akibat keputusan untuk bergabung akan jauh lebih besar.

4.4 Komitmen Militer dan National Caveats

Element paling konkret dari partisipasi Indonesia adalah rencana pengiriman pasukan. Prabowo menyatakan dalam pidatonya bahwa dia siap mengirim hingga 8.000 tentara untuk misi stabilisasi internasional, dan Indonesia disebut sebagai salah satu negara pertama yang menyatakan bersedia mengirim tentara ke ISF.³⁴ Namun, dia menyebut jumlah itu sebagai kesiapan "jika diperlukan" daripada komitmen jelas terhadap jadwal tertentu.

Adanya pembatasan adalah aspek yang paling menarik secara analitik. Menurut informasi yang diberikan pemerintah, staf Indonesia hanya memiliki tugas yang terbatas dan khusus sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Pasukan Indonesia tidak berfungsi sebagai militer dan tidak terlibat dalam operasi tempur. Mereka tidak tinggal di wilayah apa pun selain Gaza, yang merupakan bagian dari wilayah Palestina, dan mereka hanya dapat ditempatkan di sana dengan izin otoritas Palestina.³⁵ Kemlu juga menyatakan bahwa Indonesia akan menghentikan partisipasinya jika pelaksanaan ISF melanggar ketentuan nasional atau tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri, serta bahwa kehadiran personel tidak diartikan sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak terkait.³⁶

mana pun. Indonesia menolak perubahan jumlah penduduk dan pemindahan paksa warga Palestina serta dapat menghentikan tugas kapan saja.³⁷

Pembatasan ini memiliki fungsi ganda. Ia menanggapi kekhawatiran di dalam negeri bahwa TNI akan digunakan untuk melucuti kelompok bersenjata Palestina, yang tidak akan disukai. Ia mengikuti tradisi misi perdamaian PBB yang menuntut netralitas dan persetujuan pihak tuan rumah di tingkat internasional. Dengan kata lain, persyaratan nasional berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga elemen "bebas" dalam bebas aktif: Indonesia terlibat, tetapi mempertahankan hak untuk menentukan batas keterlibatannya.

Namun *caveats* juga menimbulkan dilema operasional. Mandat ISF yang dipaparkan komandannya mencakup dukungan pada demiliterisasi dan pengamanan perbatasan,³⁸ sedangkan Indonesia menolak peran demiliterisasi. Perbedaan ini dapat menyulitkan pembagian tugas di lapangan dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan mitra koalisi. Pertanyaan apakah peran Wakil Komandan dapat dilaksanakan dengan efektif di bawah pembatasan semacam itu masih perlu diteliti.

³⁴ "Ini pidato lengkap Prabowo," *Bisnis.com*; "Kenapa Indonesia kirim ribuan pasukan ISF ke Jalur Gaza?" *CNN Indonesia*, 21 Februari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260221133450-134-1330333/kenapa-indonesia-kirim-ribuan-pasukan-isf-ke-jalur-gaza>.

³⁵ "RI masuk 7 negara pertama ikut pasukan stabilisasi Gaza 'ISF'," *CNBC Indonesia*, 19 Februari 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260219225019-4-712287/ri-masuk-7-negara-pertama-ikut-pasukan-stabilisasi-gaza-isf>; "Kemlu: Personel Indonesia di ISF Gaza tak terlibat operasi tempur," *InfoPublik*, 15 Februari 2026, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/959154/kemlu-personel-indonesia-di-isf-gaza-tak-terlibat-operasi-tempur>.

³⁶ "Kemlu: Personel Indonesia di ISF Gaza," *InfoPublik*.

³⁷ "Kemlu pastikan pasukan RI di ISF hanya diturunkan di Gaza," *CNN Indonesia*, 27 Februari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260227203509-106-1332656/kemlu-pastikan-pasukan-ri-di-isf-hanya-diturunkan-di-gaza>.

³⁸ "Apa itu pasukan ISF," *CNN Indonesia*.

4.5 Dinamika Domestik: Tekanan, Klausul Keluar, dan Pembekuan

Pemerintah tidak menutup mata terhadap ketidaksetujuan sebagian orang. Pada dasarnya, kritik terfokus pada dua masalah: BoP dianggap terlalu dekat dengan agenda Amerika Serikat dan Israel, dan ada kemungkinan bahwa Indonesia melegitimasi proses yang belum mencapai kemerdekaan Palestina. Misalnya, kepala Amnesty International Indonesia memperingatkan bahwa pengerahan pasukan dapat membuat Indonesia berpartisipasi dalam mekanisme yang memperkuat pelanggaran hukum humaniter internasional,³⁹ dan seorang akademisi dari Universitas Indonesia menganggap pendekatan BoP terhadap Gaza sangat kolonial.⁴⁰ Pemerintah menanggapi dengan tiga mekanisme.

Pertama, klausul keluar yang dinyatakan terbuka. Mantan Menlu Alwi Shihab menyampaikan bahwa Presiden menegaskan Indonesia dapat dengan mudah keluar bila BoP dinilai tidak sejalan dengan cita-cita bangsa.⁴¹ Sekretaris Kabinet juga menjelaskan bahwa keanggotaan tersebut bersifat sementara, Indonesia memiliki hak penuh untuk keluar kapan saja, dan hingga saat ini Indonesia belum membayar iuran.⁴² Pernyataan-pernyataan ini berfungsi sebagai jaminan politik. Dalam logika Putnam, memperluas wilayah dukungan domestik dilakukan dengan meyakinkan para pendukung bahwa keputusan tersebut bisa dibatalkan.⁴³

Kedua, konsultasi dengan tokoh senior. Pertemuan Presiden dengan beberapa mantan menteri dan wakil menteri luar negeri pada 4 Februari 2026 bertujuan untuk membentuk kesepakatan bersama dari kalangan elite dalam menyusun kebijakan luar negeri.⁴⁴ Tokoh seperti Hasan Wirajuda mengatakan bahwa proses BoP masih dalam tahap awal dan harus dilihat dengan terbuka.⁴⁵ Pernyataan ini menarik karena bukan berupa dukungan yang sepenuhnya, melainkan penerimaan dengan syarat tertentu.

Ketiga, penghentian Maret 2026 adalah puncak pengelolaan risiko. Setelah perang AS-Israel dengan Iran memanasi pada 28 Februari, Sugiono, Menteri Luar Negeri, mengatakan bahwa diskusi BoP secara keseluruhan ditunda karena fokus beralih ke situasi di Iran. Pada 6 Maret, Kemlu secara resmi mengumumkan penundaan tersebut dan kembali menegaskan di pertengahan Maret, juga menunda pengiriman pasukan ke Gaza.⁴⁶ Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, semua persiapan pengiriman sementara dihentikan. Sementara itu, Kemlu menekankan bahwa personel TNI tetap dalam keadaan siaga jika diberi perintah untuk berangkat.⁴⁷ Oleh karena itu, alasan utama penangguhan adalah meningkatnya risiko keamanan di wilayah

³⁹ "Indonesia, Morocco, Kosovo among 5 Countries to Send Troops under Gaza Plan," *Al Jazeera*, 20 Februari 2026, <https://aljazeera.com/news/2026/2/20/indonesia-morocco-kosovo-among-5-countries-to-send-troops-under-gaza-plan>.

⁴⁰ "Solidarity with Palestinians Questioned as Indonesian Troops Set for Gaza," *Al Jazeera*, 27 Februari 2026, <https://aljazeera.com/news/2026/2/27/solidarity-with-palestinians-questioned-as-indonesian-troops-set-for-gaza>.

⁴¹ "Prabowo: RI bisa keluar Dewan Perdamaian," *Bisnis.com*.

⁴² "Isi pertemuan Prabowo," *Bisnis.com*.

⁴³ Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics."

⁴⁴ "Isi pertemuan Prabowo," *Bisnis.com*.

⁴⁵ "Prabowo: RI bisa keluar Dewan Perdamaian," *Bisnis.com*.

⁴⁶ "Indonesia Reaffirms Suspension of Gaza Peacekeeping and Board of Peace Talks," *RRI*, 13 Maret 2026, <https://rri.co.id/en/international/2270981/indonesia-reaffirms-suspension-of-gaza-peacekeeping-and-board-of-peace-talks>; "Indonesia tunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza," *InfoPublik*, 17 Maret 2026, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/963192/indonesia-tunda-pengiriman-pasukan-perdamaian-ke-gaza>.

⁴⁷ "BoP dibekukan, pasukan TNI batal ke Gaza?" *Republika*, 12 Maret 2026, <https://news.republika.co.id/berita/tbrzsa393/bop-dibekukan-pasukan-tni-batal-ke-gaza>; "Kemlu RI: Pengiriman pasukan TNI ke Gaza ditunda," *Detik*, 20 Maret 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8408435/kemlu-ri-pengiriman-pasukan-tni-ke-gaza-ditunda>.

tersebut dan perlindungan warga negara Indonesia, bukan hanya karena kurangnya kontribusi dari negara lain.⁴⁸

Meski demikian, polanya jelas. Komitmen Indonesia bersifat kontingen: ia bergantung pada stabilitas kawasan, kontribusi pihak lain, kemajuan di lapangan, dan kesesuaian dengan tujuan nasional. Pada bidang finansial, Menkeu Purbaya menyatakan pada April 2026 bahwa Indonesia berkomitmen mengirim pasukan, bukan membayar, dan Presiden menyatakan tidak pernah menjanjikan iuran US\$1 miliar.⁴⁹ Sikap ini sejalan dengan pernyataan Presiden bahwa Indonesia akan tetap berada di BoP tetapi siap keluar apabila tidak ada kemajuan.⁵⁰

4.6 Konteks Lapangan dan Status Terkini (hingga 3 Oktober 2026)

Keterlibatan Indonesia berlangsung di tengah situasi lapangan yang rapuh. Pada 31 Januari 2026, hanya beberapa pekan setelah piagam ditandatangani, serangan udara Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 31 orang menurut laporan Al Jazeera yang dikutip Antara, dan pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan sambil menempuh komunikasi melalui jalur BoP yang bersifat tertutup.⁵¹ Peristiwa ini menunjukkan sifat diplomasi Indonesia, yang lebih memilih untuk berbicara secara tertutup daripada mengemukakan secara terbuka, yang menimbulkan perdebatan tentang transparansi dan efektifitas.

Rencana pengerahan telah dibahas sebelum penangguhan. Anggota Komisi I DPR mengatakan bahwa sekitar 1.000 karyawan akan siap untuk diterjunkan pada awal April 2026 dan 8.000 karyawan akan siap pada akhir Juni 2026, asalkan "siap berangkat" tidak berarti sudah dalam perjalanan.⁵² Namun rencana tersebut tertunda karena penangguhan yang dijelaskan pada subbab 4.5, yaitu Maret 2026.

Setelah itu, proses BoP di sisi lain tetap berjalan. BoP mengumumkan kedatangan kendaraan taktis pertama di pangkalan ISF sejak awal Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan logistik untuk menggerakkan pasukan dari berbagai negara. Pada tahap selanjutnya, Israel akan melanjutkan penarikan pasukan sementara ISF akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mengawasi penyebaran bantuan.⁵³ Tidak ada berita yang menunjukkan bahwa kontingen Indonesia terlibat dalam persiapan tersebut, menurut penelusuran penulis.

Perkembangan terbaru terjadi pada 1 Oktober 2026, ketika Presiden Prabowo mengganti Menlu Sugiono dengan diplomat karier Arrmanatha Nasir, mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York. Sugiono disebut mengawasi keputusan bergabung dengan BoP dan menjanjikan pasukan untuk ISF. Setelah dilantik, Nasir menyatakan bahwa Indonesia masih memantau perkembangan BoP dan ISF.⁵⁴ Dengan demikian, hingga awal Oktober 2026 belum ditemukan pengumuman resmi bahwa penangguhan dicabut atau bahwa pasukan Indonesia telah diberangkatkan; yang ada adalah pernyataan bahwa Indonesia masih mengamati. Kesimpulan ini didasarkan pada ketiadaan temuan dalam penelusuran, sehingga perlu diverifikasi kembali dengan pernyataan resmi Kemlu dan Mabes TNI.

⁴⁸ "Indonesia Suspends Gaza Troop Deployment amid Middle East Tensions," *Middle East Monitor*, 18 Maret 2026, <https://www.middleeastmonitor.com/20260318-indonesia-suspends-gaza-troop-deployment-amid-middle-east-tensions/>.

⁴⁹ "Indonesia Affirms No Commitment to Board of Peace Payment," *Tempo English*, 21 April 2026, <https://en.tempo.co/read/2099684/indonesia-affirms-no-commitment-to-board-of-peace-payment>.

⁵⁰ "Di depan ulama, Prabowo tegaskan RI keluar," *Investortrust*.

⁵¹ "RI prihatin serangan Israel di Gaza," *Antara*.

⁵² "Catatan Komisi I DPR soal pasukan TNI ke Gaza di bawah Board of Peace," *CNN Indonesia*, 19 Februari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260219040723-32-1329429/catatan-komisi-i-dpr-soal-pasukan-tni-ke-gaza-di-bawah-board-of-peace>.

⁵³ "Peralatan militer perdana Board of Peace tiba di pangkalan ISF," *Liputan6*, 2 Juli 2026, <https://www.liputan6.com/global/read/8164660/peralatan-militer-perdana-board-of-peace-tiba-di-pangkalan-isf>.

⁵⁴ "Indonesia's Prabowo Appoints New Foreign Minister," *Reuters*, 1 Oktober 2026, dimuat di *ThePrint*, <https://theprint.in/world/indonesias-prabowo-appoints-new-foreign-minister/3059056/>.

4.7 Evaluasi dengan Lensa Teoretis

Bebas aktif

Salah satu kritik utama terhadap keterlibatan Indonesia adalah bahwa bergabung dengan lembaga yang diprakarsai Amerika Serikat mengurangi unsur "bebas". Namun, dalam ukuran Hatta, kebebasan aktif tidak melarang kerja sama dengan kekuatan besar, selama keputusan tetap otonom dan mencapai tujuan mereka sendiri.⁵⁵ Indikator otonomi dalam kasus ini mencakup klausul keluar, *national caveats*, penundaan pembayaran iuran sebelum manfaatnya jelas, konsultasi dengan negara Muslim sebagai penyeimbang, dan kesediaan membekukan keterlibatan. Dengan indikator tersebut, kebijakan ini lebih tepat disebut aktif yang bersyarat ketimbang kehilangan kebebasan. Meskipun demikian, unsur "bebas" masih diuji oleh fakta bahwa struktur BoP memberikan pengaruh yang signifikan kepada satu negara adidaya. Akibatnya, ketika keputusan BoP bertentangan dengan kepentingan Indonesia, ruang penolakan nyata baru terbuka.

Middle power dan soft power

Penunjukan sebagai Wakil Komandan ISF menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas Indonesia, baik dari sisi jumlah personel maupun legitimasi sebagai negara Muslim. Ini sesuai dengan konsep *soft power* Nye: daya tarik Indonesia, dalam bentuk kredibilitas di dunia Islam, menjadi aset yang dicari pihak lain.⁵⁶ Akan tetapi, pengaruh itu juga menimbulkan ketergantungan: Indonesia dibutuhkan karena memberi legitimasi, dan legitimasi itu akan terkikis bila hasil di lapangan mengecewakan. Dengan demikian, *soft power* di sini adalah aset yang rentan, bukan jaminan.

Permainan dua tingkat

Kasus ini menunjukkan permainan dua tingkat yang cukup jelas. Di tingkat internasional, Indonesia memperoleh akses dan posisi. Di tingkat domestik, pemerintah membayar "biaya persetujuan" melalui jaminan klausul keluar, konsultasi luas, dan pembatasan peran pasukan. Untuk menjaga dua tingkat ini, keberhasilan bergantung pada satu faktor utama: hasil nyata di Gaza. Jika bantuan kemanusiaan meningkat dan proses politik menuju solusi dua negara bergerak, pemerintah akan memperlebar *win-set*. Jika tidak, tekanan untuk keluar akan membesar.

Perlu dicatat bahwa pengambilan keputusan dalam kasus ini sangat terpusat pada Presiden. Reuters melaporkan bahwa analis menilai kementerian luar negeri di bawah Sugiono kurang berperan sementara Prabowo memainkan peran dominan dalam politik luar negeri,⁵⁷ dan Al Jazeera mengutip pengamat yang menilai keputusan bergabung mencerminkan gaya kepemimpinan yang personal dan keinginan tampil sebagai pemain global.⁵⁸ Pergantian Menlu pada Oktober 2026 dengan seorang diplomat karier, yang diperkirakan lebih mencermati setiap kesepakatan diplomatik,⁵⁹ dapat mengubah dinamika dua tingkat ini, tetapi dampaknya terhadap kebijakan BoP belum dapat dinilai.

4.8 Hambatan dan Risiko

Setidaknya lima risiko dapat diidentifikasi.

1. Risiko legitimasi: persepsi bahwa BoP merupakan instrumen kepentingan satu negara besar dapat merugikan citra Indonesia di dunia Islam dan di Global South.
2. Risiko operasional: perbedaan antara mandat ISF dan *national caveats* Indonesia, serta kapasitas logistik pengiriman ribuan personel ke wilayah konflik.
3. Risiko finansial: meski belum membayar iuran, tekanan untuk berkontribusi dana dapat muncul, sementara anggaran negara juga menghadapi prioritas domestik.

⁵⁵ Hatta, "Indonesia's Foreign Policy."

⁵⁶ Nye, *Soft Power*.

⁵⁷ "Indonesia's Prabowo Appoints New Foreign Minister," *Reuters*.

⁵⁸ "Solidarity with Palestinians Questioned," *Al Jazeera*.

⁵⁹ "Indonesia's Prabowo Appoints New Foreign Minister," *Reuters*.

4. Risiko politik domestik: korban jiwa di antara personel atau kegagalan misi akan menjadi isu politik yang berat.
5. Risiko ketergantungan pada pihak lain: efektivitas ISF bergantung pada kesediaan Israel menarik diri sesuai jadwal dan pada kontribusi negara lain, yang tidak dikendalikan Indonesia. Pembekuan Maret 2026 menunjukkan kerentanan ini.

4.9 Implikasi bagi Studi Diplomasi

Kasus ini memberi tiga pelajaran. Pertama, diplomasi perdamaian negara-negara dengan kekuatan menengah kini semakin sering berlangsung di forum yang bersifat hibrida: bukan sepenuhnya multilateral dan juga bukan sepenuhnya bilateral. Negara-negara seperti Indonesia harus membuat persyaratan khusus untuk beroperasi di dalamnya, seperti klausa keluar. Kedua, kelompok non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat keagamaan dan diplomat terkemuka, semakin bergantung pada dukungan kebijakan internasional dalam negeri. Ketiga, daripada menggunakan istilah "otomatis" yang langsung menyetujui atau menolak suatu kebijakan, istilah "bebas aktif" lebih bermanfaat sebagai referensi untuk menilai proses, yaitu apakah keputusan tetap independen dan berdasarkan syarat tertentu.

4.10 Perbandingan dengan Preseden Diplomasi Perdamaian Indonesia

Untuk mengetahui apakah peran dalam BoP merupakan keberlanjutan atau perubahan, kasus ini harus dibandingkan dengan contoh sebelumnya dalam diplomasi perdamaian Indonesia. Sejak akhir tahun 1950-an, presiden pertama telah berpartisipasi dalam tugas perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda. Dalam misi semacam itu, Indonesia melakukan tindakan berdasarkan mandat PBB, dengan mendapat persetujuan dari negara tuan rumah, dan tanpa mengambil peran dalam pertempuran. Dibandingkan dengan preseden ini, keterlibatan dalam ISF memiliki kesamaan dalam hal prinsip persetujuan dan sifat nontempur yang dijelaskan dalam national caveats, tetapi berbeda dalam struktur komando: ISF berada di bawah pengarah BoP yang dipimpin oleh figur Amerika Serikat, bukan sepenuhnya di bawah komando PBB.

Preseden kedua adalah peran Indonesia sebagai penengah dalam penyelesaian konflik Kamboja pada akhir 1980-an melalui pertemuan informal Jakarta yang mempertemukan pihak-pihak bertikai. Dalam preseden ini, Indonesia berfungsi sebagai fasilitator yang dipercaya oleh semua pihak, sehingga netralitasnya menjadi modal utama. Dalam kasus BoP, posisi netral tersebut lebih sulit dipertahankan karena Indonesia menjadi bagian dari struktur yang dirancang pihak lain dan menjadi kontributor pasukan, bukan penengah di luar proses.

Diplomasi Presiden ketiga menggabungkan garis negara dan agama, seperti pertemuan ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia di Bogor pada 2018 yang mendukung gagasan Islam moderat untuk perdamaian. Presiden ini penting karena menunjukkan kecenderungan pemerintah Indonesia untuk menggabungkan kekayaan keagamaan dengan diplomasi resmi. Dalam kasus BoP, kombinasi itu terlihat, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil: aspek keagamaan lebih banyak berfungsi sebagai penguatan legitimasi rumah tangga daripada sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik.

4.11 Skenario ke Depan

Menurut analisis tersebut, setidaknya tiga skenario dapat dipertimbangkan; namun, ketiganya bersifat analitis dan bukan prediksi.

Skenario pertama adalah keberlanjutan bersyarat. Dalam skenario ini, ISF mulai beroperasi secara perlahan, Israel terus menarik pasukan, dan akses bantuan mulai meningkat. Indonesia kemudian memulai kembali rencana pengiriman pasukan sambil tetap mempertahankan ketentuan nasionalnya. Skenario ini sesuai dengan pola pragmatisme bersyarat yang selama ini digunakan pemerintah, dan akan memperkuat argumen bahwa bergabung dari dalam memberikan hasil yang baik.

Skenario kedua adalah stagnasi. Proses politik stagnan, kontribusi negara lain rendah, dan pendanaan terbatas. Meskipun tetap menjadi anggota secara formal, Indonesia menahan komitmen militer dan keuangan. Situasi ini membahayakan reputasi Indonesia karena Indonesia dapat dikritik karena tetap berada di badan yang tidak menghasilkan perubahan, tetapi tidak ada biaya langsung. Hasil penelitian terbaru, yang dipublikasikan pada awal Oktober 2026, menunjukkan bahwa keadaan saat ini paling dekat dengan keadaan ini.

Skenario ketiga adalah penarikan diri. Situasi ini terjadi jika BoP mengambil keputusan yang dianggap bertentangan dengan tujuan membangun negara Palestina yang independen, atau jika risiko keamanan karyawan meningkat tajam. Meskipun biaya politik akan bergantung pada investasi diplomatik, termasuk posisi Wakil Komandan, dan klausul keluar yang telah dinyatakan terbuka, biaya hukum penarikan diri dianggap rendah.

Ketiga skenario ini menegaskan bahwa variabel penentu bukan terletak pada Indonesia semata, melainkan pada perilaku pihak lain: kesediaan Israel menepati jadwal penarikan, kontribusi negara-negara lain, dan konsistensi Amerika Serikat sebagai penyelenggara. Hal ini kembali menegaskan kerentanan posisi *middle power* yang terlibat dalam arsitektur yang tidak dikendalikannya.

5. KESIMPULAN

Ini memeriksa diplomasi Indonesia di Board of Peace melalui kerangka bebas aktif, *middle power* dan *soft power*, diplomasi keagamaan, dan permainan dua tingkat. Atas pertanyaan pertama, diketahui bahwa pemerintah mengambil bagian sebagai upaya praktis untuk berpartisipasi di satu-satunya forum perundingan yang tersedia; argumen tersebut mendukung akses kemanusiaan, posisi tawar menuju solusi dua negara, dan komitmen terhadap amanat konstitusi. Identitas keagamaan berperan sebagai sumber legitimasi, melalui konsultasi dengan negara-negara Muslim dan interaksi dengan ulama, bukan sebagai penentu keputusan.

Atas Pertanyaan kedua, Indonesia mengelola risiko dengan menggunakan national caveats yang membatasi tugas pasukan dalam operasi non-tempur dan non-demi militerisasi, dengan persetujuan otoritas Palestina. Hal ini termasuk klausul keluar yang terbuka, penundaan pembayaran iuran, serta penangguhan keterlibatan ketika eskalasi perang Iran mengubah prioritas keamanan. Kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk pragmatisme yang masih dalam kerangka bebas aktif, dengan syarat bahwa otonomi Indonesia baru benar-benar teruji ketika terjadi konflik kepentingan nyata yang bertentangan dengan arah kebijakan BoP.

Hingga awal Oktober 2026, belum ada laporan yang menunjukkan bahwa penangguhan telah dicabut atau pasukan Indonesia sudah dikerahkan. Menteri Luar Negeri yang baru, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa Indonesia masih memantau perkembangan BoP dan ISF.⁶⁰ Penelitian ini memiliki kekurangan karena kasusnya masih berlangsung dan data utamanya berasal dari sumber sekunder. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi diajukan.

1. Bagi pemerintah: sampaikan secara jelas dan terbuka kriteria keberhasilan serta titik keluar yang pasti, seperti indikator akses bantuan dan jadwal pengunduran pasukan Israel, agar ketentuan keluar tidak hanya berupa ucapan belaka.

2. Bagi para pembuat kebijakan pertahanan: agar posisi Wakil Komandan dapat berjalan dengan baik dan efektif, kebijakan nasional yang diterapkan harus selaras dengan tugas dan wewenang ISF sebelum operasi dimulai.

3. Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan wawancara dengan pejabat serta perwakilan organisasi keagamaan, menganalisis dokumen BoP secara langsung, serta membandingkan dengan negara-negara lain yang menjadi kontributor, seperti Maroko dan Kazakhstan.

Terakhir, diplomasi berhasil karena perubahan dalam kehidupan warga Gaza dan kemajuan menuju pemecahan politik yang adil bagi Palestina, bukan karena jumlah pasukan atau gelar wakil komandan yang dijanjikan.

⁶⁰ "Indonesia's Prabowo Appoints New Foreign Minister," *Reuters*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, N., Zebua, K. V., Simbolon, S. D., Adhian M., N. U., Haliawan, P. O., Noer, A., & Yuningsih, N. Y. (2024). Studi komparatif: Implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dan Kuwait terkait pemberian humanitarian aid terhadap polemik Palestina-Israel. *Jurnal Kajian Pemerintah*, 10(2), 25-38.
- Hatta, M. (1953). Indonesia's foreign policy. *Foreign Affairs*, 31(3), 441-452.
- Johnston, D., & Sampson, C. (Eds.). (1994). *Religion, the missing dimension of statecraft*. Oxford University Press.
- Mudore, S. B. (2019). Peran diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, 12(2), 170-181. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>
- Nugraha, T. A., & Maura, A. (2023). Analisis politik luar negeri Indonesia: Promosi 'keamanan manusia' di Palestina. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2), 83-109.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427-460.
- Satris, R. (2019). Peranan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. *POLITEA*, 2(2), 161-170. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884>
- Sukma, R. (1995). The evolution of Indonesia's foreign policy: An Indonesian view. *Asian Survey*, 35(3), 304-315.
- Suratiningsih, D., Puspita, D., & Safira. (2020). Diplomasi pemerintah Indonesia dan NGO kemanusiaan Indonesia dalam isu Palestina pada tahun 2014-2020. *Proyeksi*, 25(1), 11-28. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.V25i1.2602>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- ABC News. (2026, 11 Februari). *Indonesia readies up to 8,000 troops for Board of Peace efforts in Gaza*. <https://www.abc.net.au/news/2026-02-11/indonesia-to-send-8000-troops-to-gaza-idf-peacekeeping/106330718>
- Al Jazeera. (2026a, 20 Februari). *Indonesia, Morocco, Kosovo among 5 countries to send troops under Gaza plan*. <https://aljazeera.com/news/2026/2/20/indonesia-morocco-kosovo-among-5-countries-to-send-troops-under-gaza-plan>
- Al Jazeera. (2026b, 27 Februari). *Solidarity with Palestinians questioned as Indonesian troops set for Gaza*. <https://aljazeera.com/news/2026/2/27/solidarity-with-palestinians-questioned-as-indonesian-troops-set-for-gaza>
- Antara. (2026a). *RI prihatin serangan Israel di Gaza, tempuh jalur Dewan Perdamaian*. <https://www.antaranews.com/berita/5390018/ri-prihatin-serangan-israel-di-gaza-tempuh-jalur-dewan-perdamaian>
- Antara. (2026b). *Ketua MPR RI sebut Indonesia ikut BoP untuk bebaskan Palestina dari cengkeraman Israel*. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/502522/ketua-mpr-ri-sebut-indonesia-ikut-bop-untuk-bebaskan-palestina-dari-cengkeraman-israel>
- Bisnis.com. (2026a, 20 Februari). *Ini pidato lengkap Prabowo di Board of Peace: Komitmen perdamaian dan 8.000 pasukan untuk Gaza*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20260220/15/1954344/ini-pidato-lengkap-prabowo-di-board-of-peace-komitmen-perdamaian-dan-8000-pasukan-untuk-gaza>
- Bisnis.com. (2026b, 5 Februari). *Isi pertemuan Prabowo dengan eks Menlu-Wamenlu di Istana, bahas Board of Peace*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20260205/15/1950335/isi-pertemuan-prabowo-dengan-eks-menlu-wamenlu-di-istana-bahas-board-of-peace>
- Bisnis.com. (2026c, 5 Februari). *Prabowo: RI bisa keluar Dewan Perdamaian, uang iuran untuk bantu rakyat Palestina*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20260205/15/1950299/prabowo-ri-bisa-keluar-dewan-perdamaian-uang-iuran-untuk-bantu-rakyat-palestina>

- Bisnis.com. (2026d, 23 Januari). *Serba-serbi Prabowo di WEF 2026 Davos: Gabung Dewan Perdamaian Gaza & pidato Prabowonomics*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20260123/15/1946592/serba-serbi-prabowo-di-wef-2026-davos-gabung-dewan-perdamaian-gaza-pidato-prabowonomics>
- Bisnis.com. (2026e, 19 Februari). *Prabowo hadir KTT perdana Board of Peace, tegaskan komitmen untuk Gaza*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20260219/15/1954212/prabowo-hadiri-ktt-perdana-board-of-peace-tegaskan-komitmen-untuk-gaza>
- CNBC Indonesia. (2026, 19 Februari). *RI masuk 7 negara pertama ikut pasukan stabilisasi Gaza 'ISF'*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260219225019-4-712287/ri-masuk-7-negara-pertama-ikut-pasukan-stabilisasi-gaza-isf>
- CNN Indonesia. (2026a, 20 Februari). *Apa itu pasukan ISF yang diumumkan Board of Peace?*
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260220090319-134-1329890/apa-itu-pasukan-isf-yang-diumumkan-board-of-peace>
- CNN Indonesia. (2026b, 21 Februari). *Kenapa Indonesia kirim ribuan pasukan ISF ke Jalur Gaza?* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260221133450-134-1330333/kenapa-indonesia-kirim-ribuan-pasukan-isf-ke-jalur-gaza>
- CNN Indonesia. (2026c, 27 Februari). *Kemlu pastikan pasukan RI di ISF hanya diturunkan di Gaza*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260227203509-106-1332656/kemlu-pastikan-pasukan-ri-di-isf-hanya-diturunkan-di-gaza>
- CNN Indonesia. (2026d, 19 Februari). *Catatan Komisi I DPR soal pasukan TNI ke Gaza di bawah Board of Peace*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260219040723-32-1329429/catatan-komisi-i-dpr-soal-pasukan-tni-ke-gaza-di-bawah-board-of-peace>
- Detik. (2026, 20 Maret). *Kemlu RI: Pengiriman pasukan TNI ke Gaza ditunda*.
<https://news.detik.com/berita/d-8408435/kemlu-ri-pengiriman-pasukan-tni-ke-gaza-ditunda>
- IDN Times. (2026). *Apa itu pasukan ISF yang diumumkan Board of Peace, RI wakil komandan!*
<https://www.idntimes.com/news/world/apa-itu-pasukan-isf-yang-diumumkan-board-of-peace-c1c2-01-vtsv1-b8q5qw>
- IDXChannel. (2026). *Buka akses bantuan ke Gaza jadi salah satu alasan Presiden Prabowo gabung Board of Peace*. <https://www.idxchannel.com/news/buka-akses-bantuan-ke-gaza-jadi-salah-satu-alasan-presiden-prabowo-gabung-board-of-peace>
- InfoPublik. (2026a, 15 Februari). *Kemlu: Personel Indonesia di ISF Gaza tak terlibat operasi tempur*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/959154/kemlu-personel-indonesia-di-isf-gaza-tak-terlibat-operasi-tempur>
- InfoPublik. (2026b, 17 Maret). *Indonesia tunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza*.
<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/963192/indonesia-tunda-pengiriman-pasukan-perdamaian-ke-gaza>
- Investortrust. (2026). *Di depan ulama, Prabowo tegaskan RI keluar dari BoP jika tak perjuangkan Palestina*. <https://investortrust.id/international/96406/di-depan-ulama-prabowo-tegaskan-ri-keluar-dari-bop-jika-tak-perjuangkan-palestina>

- Liputan6. (2026, 2 Juli). *Peralatan militer perdana Board of Peace tiba di pangkalan ISF*.
<https://www.liputan6.com/global/read/8164660/peralatan-militer-perdana-board-of-peace-tiba-di-pangkalan-isf>
- Malay Mail. (2026, 7 Maret). *Prabowo faces Muslim group backlash, says Indonesia will quit Trump's Board of Peace if it fails to benefit Palestinians*.
<https://www.malaymail.com/news/world/2026/03/07/prabowo-faces-muslim-group-backlash-says-indonesia-will-quit-trumps-board-of-peace-if-it-fails-to-benefit-palestinians/211672>
- Metro TV. (2026). *Indonesia pimpin langkah strategis perdamaian Palestina melalui Board of Peace*. <https://www.metrotvnews.com/read/KRXC5dg3-indonesia-pimpin-langkah-strategis-perdamaian-palestina-melalui-board-of-peace>
- Middle East Monitor. (2026, 18 Maret). *Indonesia suspends Gaza troop deployment amid Middle East tensions*. <https://www.middleeastmonitor.com/20260318-indonesia-suspends-gaza-troop-deployment-amid-middle-east-tensions/>
- Republika. (2026, 12 Maret). *BoP dibekukan, pasukan TNI batal ke Gaza?*
<https://news.republika.co.id/berita/tbrzsa393/bop-dibekukan-pasukan-tni-batal-ke-gaza>
- Reuters. (2026a, 4 Maret). *Discussions with Board of Peace 'on hold' due to Iran war, Indonesia says*. <https://www.yahoo.com/news/articles/discussions-board-peace-hold-due-095655588.html>
- Reuters. (2026b, 1 Oktober). *Indonesia's Prabowo appoints new foreign minister*.
<https://theprint.in/world/indonesias-prabowo-appoints-new-foreign-minister/3059056/>
- RRI. (2026, 13 Maret). *Indonesia reaffirms suspension of Gaza peacekeeping and Board of Peace talks*. <https://rri.co.id/en/international/2270981/indonesia-reaffirms-suspension-of-gaza-peacekeeping-and-board-of-peace-talks>
- Tempo. (2026, 19 Februari). *Indonesia jadi wakil komandan pasukan stabilisasi Gaza*.
<https://www.tempo.co/politik/indonesia-jadi-wakil-komandan-pasukan-stabilisasi-gaza-2116397>
- Tempo English. (2026, 21 April). *Indonesia affirms no commitment to Board of Peace payment*. <https://en.tempo.co/read/2099684/indonesia-affirms-no-commitment-to-board-of-peace-payment>